

BAB I

A. Latar Belakang

Kondisi hubungan internasional dewasa ini banyak dipenuhi oleh isu sosial dan budaya, lingkungan, serta isu ekonomi. Isu sosial meliputi pemberantasan perdagangan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, masalah suaka dan pengungsian, masalah pelanggaran hak asasi manusia dan lain sebagainya. Isu pemanasan global, perubahan iklim, dan konservasi hewan langka merupakan masalah yang populer dalam isu lingkungan, karena masalah-masalah tersebut banyak mendapat perhatian dari masyarakat di dunia yang tergabung dalam kelompok-kelompok aktivis peduli lingkungan. Selain itu, dalam Isu-isu ekonomi meliputi masalah ekspor dan impor, upaya negara-negara yang bekerja sama untuk mengurangi hambatan perdagangan atau *free trade*, masalah ketergantungan dan kesenjangan, *foreign direct investment (FDI)*, dan lain sebagainya yang mampu mempengaruhi politik suatu negara baik itu isu domestik yang politik luar negeri maupun isu internasional yang mampu mempengaruhi politik dalam negeri.

Salah satu isu kontemporer dalam hubungan internasional adalah kerja sama internasional. Negara pada umumnya melakukan hubungan kerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan negaranya, salah satu bidang kerja sama untuk mencapai kesejahteraan dalam negeri adalah dengan menjalin kerja sama ekonomi dengan negara lain. Kerja sama ekonomi antarnegara bisa berupa kerja sama ekonomi di dalam suatu organisasi internasional seperti *world trade organization*, atau dalam suatu perjanjian antar negara, misal *ASEAN-CHINA Free Trade Area(ACFTA)* atau *European Community*, atau kesepakatan bilateral seperti

perjanjian kerja sama ekonomi (*economic partnership*) atau perjanjian *free trade agreement* (FTA) yang sering muncul dewasa ini. Salah satu negara yang melakukan kerja sama bilateral adalah Jepang, yang telah mengadakan perjanjian kerja sama ekonomi dengan Indonesia, Thailand, India, Tiongkok, Swiss, Vietnam, Australia, kemudian dengan beberapa negara lagi yang masih dalam tahap negosiasi seperti dengan Kanada, Korea Selatan, Kolombia, dan Turki. (Ministry Of Foreign Affair of Japan, 2015) Hal yang serupa juga dilakukan oleh Republik Turki yang telah menjalin kerja sama ekonomi melalui perjanjian perdagangan bebas dengan beberapa negara secara bilateral, seperti perjanjian perdagangan bebas Turki dan Lebanon yang tinggal menunggu tahap ratifikasi, dan perjanjian perdagangan bebas Turki dan Suriah yang statusnya saat ini ditunda karena posisi politik luar negeri pemerintah Turki terhadap rezim Suriah. Serta dengan negara-negara seperti Israel, Macedonia, Kroasia, Bosnia-Herzegovina, Palestina, Maroko, Tunisia, Mesir, Albania, Georgia, Montenegro, Serbia, Chile, Yordania, Korea Selatan, dan Mauritius. (Morrison, 2014) Selain itu, Turki juga menjalin kerja sama ekonomi dengan Jepang. Perlu diketahui Hubungan bilateral antara Turki dengan Jepang semakin intens sejak dekade terakhir.

Dalam sejarahnya hubungan kedua negara, yaitu Turki dan Jepang) telah ada sejak abad ke 19 yang pada saat itu Turki masih dalam era kesultanan Ustmani dan Jepang masih dalam era Meiji. Pada tahun 1890 Sultan Abdulhamid II Ottoman mengirim sebuah medali dengan kapal yang dipimpin oleh Osman Pasha untuk Kaisar Meiji Jepang. Dalam perjalanan pulang Kapal Ertuğrul yang membawa delegasi Turki terjebak dalam badai dan tenggelam di lepas pantai Jepang, awak kapal yang awalnya terdiri dari 540 orang menjadi hanya 64 yang berhasil

diselamatkan. (Çolakoğlu, 2014) Di era modern hubungan kedua negara secara resmi dimulai pada tahun 1924, yang pada saat itu Jepang membuka kedutaan besar di Ankara saat Republik Turki baru terbentuk, kemudian Turki membuka kedutaan besar di Tokyo setahun setelahnya. Namun saat perang dunia II pecah Turki memutuskan hubungannya dengan Jepang kemudian menyatakan perang melawan Jepang dan Jerman di tahun 1945. Setelah Perang Dunia II usai, kedua negara kembali membuka kedutaan besar di masing-masing negara pada tahun 1953 dan di tahun 1954 Jepang membuka Konsulat Jenderal di Istanbul. (Ministry Of Foreign Affair of Japan, 2015)

Pada tahun 1985 pemerintah Turki dan *Turkish Airlines* membantu warga Jepang untuk meninggalkan Iran saat terjadi perang Iran-Irak. Kemudian pemerintah di Turki membuat sebuah keputusan untuk mengirim sebuah pesawat *Turkish Airlines* ke Teheran untuk mengevakuasi sekitar 200 warga Jepang yang berisiko terkena serangan udara yang dilakukan oleh Irak, yang saat itu pemerintah Jepang gagal dalam upaya mengirim pesawat untuk menyelamatkan warga Jepang. Hal ini menyebabkan respons besar di Jepang dan memperkuat citra Turki sebagai salah satu aliansi yang dapat diandalkan Jepang. Selain itu, kedua negara juga saling membantu dalam hal penanggulangan bencana seperti Jepang yang memberikan bantuan darurat ke Turki ketika negara itu dilanda gempa bumi besar di Izmit pada tahun 1999 dan di tahun 2011 Vandan Turki memberikan bantuan ke Jepang saat terjadi gempa Bumi dahsyat pada Maret 2011. (Higashino, 2014)

Sejak dibukanya kedutaan besar di masing-masing negara, hubungan Turki dan Jepang awalnya berfokus dalam melakukan kerja sama di bidang sosial-budaya dan ilmu pengetahuan, seperti diadakannya pertukaran kebudayaan

(*cultural exchange*) di masing-masing negara dan dibukanya *Turkish-Japanese foundation culture center* di Ankara tahun 1998 oleh Presiden Suleyman Demirel dan Pangeran serta Putri Tomohito dari Mikasa. Kemudian sejak tahun 2000 pejabat negara dari Turki mulai melakukan kunjungan-kunjungan resmi ke Jepang dan begitu pun sebaliknya (Ministry Of Foreign Affair of Japan, 2015). Tujuan dari kunjungan-kunjungan tersebut selain untuk memperkuat hubungan kedua negara dibidang sosial-budaya juga untuk membahas mengenai peningkatan kerja sama di bidang ekonomi, yaitu Turki dan Jepang berusaha untuk meningkatkan volume perdagangan kedua negara yang berada pada angka US \$4 miliar, juga meningkatkan investasi asing langsung (*foreign direct investment*) dari Jepang ke Turki. (Kanan, 2015)

Pada bidang ekonomi pada tahun 1987, Federasi Bisnis Jepang yang disebut dengan *Keidanren* mengadakan pertemuan dengan Dewan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Turki (*The Foreign Economic Relations Board*) untuk membentuk *Japan-Turkey Joint Economic Commitee*. Terdiri dari perwakilan pemerintah, sektor swasta dan akademisi, anggota JTC telah bertemu lebih dari dua puluh kali sejak awal organisasi. Mereka telah dicapai beberapa kesepakatan dan beberapa undang-undang. Tujuan dibentuknya komite ini adalah untuk memajukan dan memperkuat hubungan ekonomi antara Turki dengan Jepang. Kemudian pada tahun 1992 Jepang dan Turki menandatangani sebuah perjanjian mengenai promosi timbal balik dan perlindungan investasi, perjanjian ini disebut dengan *The Japan-Turkey Agreement on Investment* dan pada tahun 1993 perjanjian ini mulai diberlakukan. Tujuan dari ditandatanganinya perjanjian ini adalah untuk memperkuat kerja sama ekonomi bilateral Turki dan Jepang, memberikan

perlakuan yang saling menguntungkan baik dalam bidang investasi dan aktivitas komersial yang berhubungan dengan investasi maupun dalam perlindungan aset investasi.

Selanjutnya pada tahun 1993 Turki dan Jepang telah menyimpulkan negosiasi perjanjian untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak dengan memperhatikan pada pajak penghasilan. Perjanjian ini ditandatangani oleh Turki dan Jepang pada tahun 1993 dan mulai diberlakukan pada tahun 1994. Perjanjian pajak ganda ini adalah kesepakatan rutin yang tidak membedakan hubungan bilateral antara kedua negara atau karakter hubungan perdagangan mereka dengan negara lain, tetapi tetap merupakan prasyarat untuk hubungan ekonomi yang lebih dekat dan dasar untuk kerja sama strategis bilateral. (Morrison, 2014)

Perundingan dengan Jepang terkait peningkatan kerja sama ekonomi bilateral ini tampaknya semakin serius dengan dimulainya perundingan untuk *Japan-Turkey Economic Partnership Agreement (EPA)*. Negosiasi antara Turki-Jepang tentang EPA telah dimulai sejak Desember 2014. (Kanan, 2015) Dalam perundingannya, Jepang diwakili oleh Suzuki Toshiro (ketua Perdagangan internasional & kerja sama ekonomi) dan beberapa perwakilan dari kementerian lainnya, sedangkan Turki diwakili oleh Murat Yapici (Direktur jenderal bidang Kerja sama Uni Eropa) dan beberapa perwakilan dari kementerian lain. (Ministry Of Foreign Affair of Japan, 2015)

Pada perundingan putaran pertama, kedua pihak membahas metode negosiasi dan lingkup negosiasi seperti perdagangan barang dan jasa. Pada putaran kedua, kedua pihak membahas tentang perdagangan barang, investasi, hak

kekayaan intelektual, perbaikan lingkungan bisnis, belanja pemerintah, *Sanitary and Phytosanitary Measures* (SPS), hambatan teknis dalam perdagangan (*Technical Barriers to Trade*), perdagangan elektronik, ketenagakerjaan dan ketentuan umum. Pada perundingan putaran ketiga, kedua pihak membahas mengenai bidang perdagangan barang, perdagangan bidang jasa, investasi, hak atas kekayaan intelektual, peningkatan lingkungan bisnis, belanja pemerintah, perdagangan elektronik, dan aturan-aturan umum, aturan-aturan mengenai asal barang (*rule of origin*), prosedur bea cukai, persaingan dan penyelesaian sengketa, *Sanitary and Phytosanitary Measures* (SPS), hambatan teknis dalam perdagangan (*Technical Barriers to Trade*), (Ministry Of Foreign Affair of Japan, 2015). *Sanitary and Phytosanitary Measures* (SPS) adalah peraturan yang menjamin bahwa perdagangan barang yang dilakukan telah memenuhi standar kesehatan dan tidak mengancam kesehatan manusia, hewan dan, tumbuhan. Standar kesehatan yang ditentukan oleh suatu negara harus berdasarkan penelitian ilmiah dan tidak bersifat diskriminatif. Sedangkan *Technical Barriers to Trade* adalah kesepakatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan teknis, standar, dan prosedur pemeriksaan bersifat non-diskriminatif dan tidak menciptakan hambatan yang tidak perlu terhadap perdagangan. (Morrison, 2014)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, penulis mengangkat rumusan masalah yaitu : Mengapa Turki meningkatkan kerja sama ekonomi dengan Jepang dalam *Japan-Turkey Economic Partnership Agreement* (EPA) ?

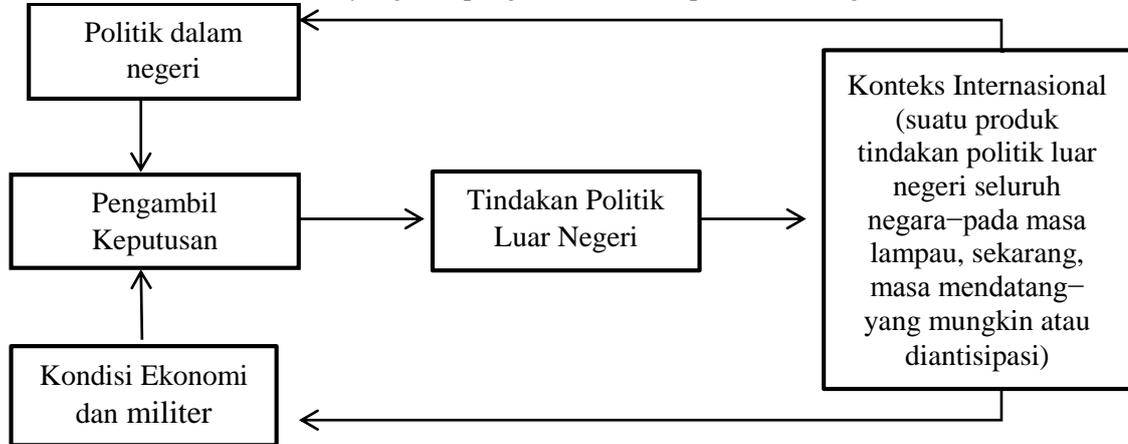
C. Kerangka Berpikir

Teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri

Menurut C. Plano dan Roy Olton, kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang diputuskan oleh para pembuat keputusan negara untuk menghadapi negara lain atau entitas politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasionalnya yang spesifik, dituangkan dalam kepentingan nasional. Kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh suatu negara memang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang diperintahnya, walaupun kepentingan nasional suatu negara pada saat itu ditentukan oleh pihak yang berkuasa pada era tersebut. Untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, negara-negara maupun aktor lain dari negara tersebut mengadakan berbagai macam kerja sama bilateral, trilateral, regional ataupun multilateral (Perwita & Yani, 2005). Dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri menurut William D. Coplin, mendapat pengaruh dari berbagai pertimbangan tertentu. Menurut William D Coplin dalam membuat kebijakan luar negeri, para pembuat kebijakan dipengaruhi oleh tiga pertimbangan yaitu; pertama, kondisi politik dalam negeri, kedua, kondisi atau kemampuan ekonomi dan militer dan ketiga, konteks internasional yaitu posisi suatu negara dalam berinteraksi dengan negara lain. (Coplin & Marbun, 2003)

Penjelasan dari uraian di atas, oleh William D Coplin dibuatkan model sebagai berikut.

Bagan 1.1 : Skema determinan yang mempengaruhi tindakan politik luar negeri



Sumber : Coplin, W. D., & Marbun, M. (2003). *Pengantar Politik internasional : Suatu Telaah Teoritis*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

1. Kondisi Politik Dalam Negeri

Dalam model tersebut, Coplin lebih berfokus pada pengambil keputusan (*decision maker*) atau pihak yang berperan utama dalam membuat keputusan dalam berhubungan dengan negara lain. Menurut Coplin, kebijakan luar negeri mendapat pengaruh dari kondisi politik dalam negeri, karena adanya interaksi antara pembuat kebijakan luar negeri dengan aktor atau entitas di dalam negeri yang berupaya mempengaruhi politik luar negeri. Aktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri ini disebut "*policy influencer*". (Coplin & Marbun, 2003)

Coplin juga menjelaskan Hubungan antara pengambil keputusan dengan *policy influencers* terjadi secara timbal balik. Hubungan antara pembuat kebijakan dengan *policy influencers* disebut dengan "*policy influencer system*". Pengambil keputusan membutuhkan *policy influencers* karena mereka merupakan sumber dukungan baginya, dukungan itu berupa kesetiaan angkatan bersenjata, dukungan

finansial dari para pengusaha, dukungan rakyat dalam pemilu, atau ketidaksediaan rakyat untuk melawan pemerintah. Di sisi lain, *policy influencers* membutuhkan pengambil keputusan untuk mempermudah jalan tuntutan diputuskan sebagai suatu kebijakan. Apabila tuntutan *policy influencers* tidak dipenuhi oleh pengambil keputusan, maka sebagian atau bahkan seluruh dukungan dari *policy influencers* kepada pengambil keputusan akan hilang. Pengambil keputusan tidak selalu menanggapi tuntutan itu secara positif. Tetapi, para pengambil keputusan akan mengakomodasi sampai batas tertentu untuk bisa mengabaikan tuntutan itu. (Coplin & Marbun, 2003)

Teori William D Coplin tersebut diperkuat oleh pendapat David Easton tentang sistem politik. Menurut Easton, Kondisi Politik Dalam Negeri merupakan gambaran mengenai “dukungan dan tuntutan” yang datang dari warga negaranya atau oleh Easton disebut dengan *input*. *Input* yang berupa tuntutan dan dukungan tersebut akan mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dan selanjutnya akan membentuk kondisi dalam negeri. Sehingga para pembuat keputusan dapat mengacu pada kondisi dalam negeri, apakah dukungan dan tuntutan dari aktor-aktor di dalam negeri sependapat dengan kebijakan yang telah dibuat oleh pembuat kebijakan. (Budiardjo, 2003)

Terdapat empat aktor politik dalam negeri yang mempengaruhi para pembuat kebijakan luar negeri (*policy influencer*) yaitu Birokrat (*bureaucratic influencer*), Partai (*Partisan influencer*), Kelompok Kepentingan (*Interest influencer*), dan Massa atau pendapat masyarakat (*Mass influencer*). Keempat aktor politik dalam negeri tersebut, yang dikemukakan oleh Coplin, mirip dengan empat kategori milik Gabriel Almond yaitu elit politik yang terdiri dari para pejabat

terpilih serta anggota partai, elit administratif atau para birokrat, para elit kepentingan, dan elit komunikasi. Yang berbeda dari keduanya adalah kategori partai yang mempengaruhi (*Partisan influencer*), Coplin membedakan aktor yang mempengaruhi dengan para pembuat kebijakan sehingga pada kategori partai yang mempengaruhi kebijakan luar negeri, tidak termasuk para pejabat terpilih seperti yang dikemukakan oleh Gabriel Almond. Coplin juga menjelaskan bahwa meskipun perlu dibedakan antara pembuat kebijakan dengan *policy influencer*, namun terkadang cukup sulit untuk mengadakan perbedaan itu karena sering kali satu pihak memainkan dua peran sekaligus. Yaitu peran sebagai *policy influencer* dan sebagai pembuat kebijakan, terutama dalam birokrasi politik luar negeri. (Coplin & Marbun, 2003)

a. Birokrat yang Mempengaruhi (*bureaucratic influencer*)

Birokrat yang mempengaruhi atau *bureaucratic influencer* merupakan kategori *policy influencer* yang ada di setiap negara. Birokrat ini sendiri merupakan organisasi-organisasi yang berskala luas sebagai bagian dari lembaga eksekutif yang biasanya tersusun berdasarkan posisi-posisi fungsional dalam kebijakan-kebijakan ekonomi, politik luar negeri, maupun kesejahteraan sosial. Coplin menggunakan istilah *bureaucratic influencer* sebagai rujukan terhadap individu-individu dan organisasi-organisasi dalam lembaga eksekutif pemerintah yang berperan dalam membantu para pembuat kebijakan dalam menyusun maupun melaksanakan kebijakan-kebijakan. (Coplin & Marbun, 2003)

Terkadang anggota birokrasi juga memainkan peran sebagai pembuat kebijakan sehingga sulit untuk membuat pembeda antara birokrasi yang bertindak sebagai *policy influencer* dengan birokrasi sebagai pembuat keputusan. Hal

tersebutlah yang membuat birokrasi menjadi kelompok yang begitu berpengaruh dalam proses pembuatan kebijakan. Para birokrasi tersebut mempunyai akses langsung kepada para pembuat kebijakan, yaitu mereka menyalurkan informasi kepada para pembuat kebijakan dan kemudian melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan itu, dan dalam banyak kasus para birokrat ini tidak secara terbuka menolak kebijakan-kebijakan yang dibuat. (Coplin & Marbun, 2003)

Kelompok birokrasi bertindak di belakang layar dengan memberikan informasi-informasi untuk mengambil kebijakan dan kemudian digunakan sebagai instrumen untuk melaksanakan kebijakan itu. Pengaruh birokrasi dalam pengambilan kebijakan ditentukan oleh tingkat kepercayaan kelompok birokrasi terhadap pengambil kebijakan, sehingga dukungan dari rakyat tidak begitu diperhitungkan oleh birokrat dalam mempengaruhi kebijakan. (Coplin & Marbun, 2003)

b. Partai yang Mempengaruhi (*Partisan influencer*)

Partai yang mempengaruhi kebijakan atau *Partisan influencer* adalah kategori *policy influencer* yang bertindak untuk menerjemahkan tuntutan publik menjadi tuntutan politis yang kemudian disampaikan kepada para pembuat kebijakan terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. *Policy influencer* kategori ini berupaya untuk mempengaruhi kebijakan dengan cara menekan pihak-pihak yang berkuasa di pemerintahan dan dengan menyediakan kader-kader yang mampu berperan dalam pembuatan kebijakan. *Partisan influencer* juga sering berfungsi sebagai informasi dua arah antara para pembuat kebijakan dengan masyarakat. (Coplin & Marbun, 2003) Namun dalam sebagian kasus, *Partisan*

influencer memainkan peran yang terbatas dalam memengaruhi kebijakan luar negeri satu negara. Alasan utamanya adalah karena *Partisan influencer* lebih cenderung untuk memperhatikan keadaan politik dalam negeri dibandingkan politik luar negeri. isu yang sering diperhatikan oleh *partisan influencer* biasanya merupakan isu keamanan nasional, imigrasi, dan bantuan luar negeri. meski demikian, pembuat keputusan membutuhkan dukungan dari kelompok ini demi memelihara rezim. (Coplin & Marbun, 2003)

c. Kepentingan yang Mempengaruhi (*Interest influencer*)

Kelompok kepentingan yang mempengaruhi atau *Interest influencer* adalah sekelompok orang yang bergabung atas dasar serangkaian kesamaan kepentingan yang cakupan kepentingan tersebut tidak luas sehingga tak sama dengan aktivitas kelompok partai, dan dalam banyak hal kepentingan tersebut bersifat ekonomis. *Interest influencer* biasanya memainkan peranan yang besar karena banyak organisasi dan kelompok-kelompok informal dari berbagai macam kepentingan, baik ekonomis maupun non-ekonomis, mempunyai sumber finansial yang besar sehingga mampu mempengaruhi para pembuat kebijakan, terutama dalam negara yang menerapkan sistem demokrasi di negaranya. (Coplin & Marbun, 2003)

Interest influencer menggunakan beberapa cara untuk membentuk dukungan atas kepentingan mereka, biasanya dengan melakukan orasi atau kampanye yang ditujukan baik kepada birokrasi, kelompok partai, maupun kepada pembuat kebijakan. Selain itu, kelompok ini dapat menjanjikan dukung finansial atau mengancam akan menarik dukungan finansialnya. Terkadang kelompok ini membiayai kampanye publik untuk membangun dukungan terhadap

kepentingannya yang kemudian bisa menekan pengambil kebijakan. (Coplin & Marbun, 2003)

d. Massa yang Mempengaruhi (*Mass influencer*)

Massa yang mempengaruhi atau *Mass influencer* yang dimaksudkan oleh Coplin adalah opini publik yang mengacu pada iklim opini yang berkembang dalam masyarakat yang menjadi pertimbangan bagi para pembuat kebijakan dalam membuat kebijakan luar negeri. Dalam negara demokrasi, para pembuat kebijakan memerlukan *Mass influencer* atau massa karena peran mereka dalam pemilihan umum. Para pembuat kebijakan merumuskan berbagai keputusan dengan memperhitungkan dampak yang timbul terhadap opini publik dan di pemilihan umum berikutnya. (Coplin & Marbun, 2003)

Namun Coplin menjelaskan bahwa, dengan memperhitungkan opini publik bukan berarti bahwa para pembuat kebijakan dikendalikan oleh opini massa atau *Mass influencer* tersebut. Dalam beberapa kasus, para pembuat kebijakan menggunakan peluang untuk memanipulasi opini publik untuk mendukung kebijakan yang mereka buat. Walaupun masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi, tapi jarang dari mereka yang menyaring informasi yang mereka peroleh. Serta, walaupun masyarakat mampu menyaring informasi yang diperoleh, sebagian dari masyarakat tersebut tidak memiliki kemampuan dalam memberikan arahan yang baik kepada para pembuat kebijakan politik luar negeri. Dalam sebagian kasus, opini publik digunakan oleh para pembuat kebijakan untuk merasionalisasikan atau membenarkan tindakan-tindakan politik luar negeri yang dibuat dan bukan menggunakan opini publik sebagai penentu kebijakan. Pembuat kebijakan membutuhkan dukungan dari *mass influencer*, terutama pada saat

menjelang pemilihan umum, sehingga para pembuat kebijakan memperhatikan dampak suatu kebijakan terhadap opini publik dan pada pemilu yang akan datang. (Coplin & Marbun, 2003)

2. Kondisi Ekonomi dan Militer

Dari segi kondisi ekonomi dan militer, menurut Coplin setiap negara patutnya memperhatikan kemampuan dan kondisi ekonomi ataupun militernya agar dapat mewujudkan tujuan dari kebijakan luar negerinya. Dari segi ekonomi, sektor kapasitas produksi barang dan jasa serta kebergantungan suatu negara pada perdagangan dan finansial internasional menjadi aspek yang perlu diperhatikan. (Coplin & Marbun, 2003)

Turki telah berhasil meningkatkan perekonomiannya sejak krisis yang melanda Turki di tahun 2000-2001 dengan melakukan perubahan kebijakan keuangan. Sejak AKP berkuasa di Turki, pemerintah Turki berusaha melaksanakan liberalisasi ekonomi, peningkatan investasi asing. (Alfan, 2015) Setelah diberlakukannya kebijakan yang memfokuskan pada ekspor, aktivitas ekspor menjadi hal yang penting bagi Turki. Sehingga muncul kemajuan terutama di sektor industri pangan, *automobile*, besi, dan tekstil. (ISPAT, 2014) Dibalik pertumbuhan ekonominya, angka pengangguran di Turki cukup tinggi, menurut laporan dari *Turkish Statistics Institute (TurkStat)* pengangguran di Turki terus meningkat, di awal tahun 2012 angka pengangguran mencapai 8,2% dari total populasi Turki, dan di akhir tahun 2013 mencapai 9,10%. kenaikan angka pengangguran diikuti dengan penurunan jumlah investasi yang masuk ke Turki. Dari 16,1 Miliar USD (tahun 2011), menjadi 13,2 Miliar USD (tahun 2012), dan turun lagi menjadi 12,4 Miliar USD (tahun 2013). (Today's Zaman, 2015) Berdasarkan paparan di atas, bisa

dikatakan bahwa perdagangan internasional dan investasi asing merupakan hal yang penting bagi Turki, sehingga pemerintah Turki berusaha untuk meningkatkan perdagangan internasionalnya dan aliran masuk investasi asing ke Turki.

3. Konteks Internasional

Selanjutnya menurut Coplin, faktor yang memengaruhi kebijakan luar negeri adalah konteks internasional. Pada dasarnya para peneliti hubungan internasional percaya bahwa konteks internasional, sering disebut juga sistem internasional, mampu mempengaruhi perilaku suatu negara. Perubahan tatanan dunia pasca Perang Dingin, yaitu saat negara-negara di dunia mulai berfokus pada pembangunan ekonomi negaranya, membawa dampak yang bagi perilaku suatu negara dengan negara lain. (Coplin & Marbun, 2003)

Menurut penjelasan Coplin, ada tiga elemen penting yang berkaitan dengan dampak konteks internasional terhadap politik atau kebijakan luar negeri suatu negara. Ketiga faktor itu adalah faktor geografis, ekonomi, dan politik. Selain itu Coplin juga menjelaskan bahwa konteks internasional suatu negara meliputi lokasi yang ditempati negara tersebut, dalam kaitannya dengan negara-negara lain di dalam sistem tersebut, dan berbagai hubungan ekonomi dan politik yang dimiliki negara tersebut dengan negara lain. (Coplin & Marbun, 2003)

Pada umumnya, faktor geografis yang memainkan peran penting dalam kebijakan luar negeri suatu negara. Karena kerja sama regionalisme terjadi akibat faktor geografis yang dimiliki sekelompok negara. Faktor yang tidak kalah penting lainnya adalah faktor hubungan ekonomi. Arus pertukaran barang dan jasa serta arus modal dinilai mampu membuat suatu negara bergantung pada negara lain atau saling bergantung. Kemudian hubungan politik yang dimiliki suatu negara dengan

negara lain juga turut berperan dalam kebijakan luar negeri suatu negara. Hubungan politik antarnegara ini yang berperan dalam aliansi antarnegara, serta hubungan perang dan damai. (Coplin & Marbun, 2003)

Di era yang sekarang ini, banyak negara-negara yang menjalin hubungan satu sama lain yang bersifat kerja sama. Kerja sama antarnegara dilakukan untuk mencari solusi dari suatu masalah kolektif maupun untuk meningkatkan kesejahteraan di masing-masing negara. Setidaknya dengan melakukan kerja sama internasional, setiap negara berusaha untuk mencari solusi dari dua tipe masalah. Tipe pertama terkait dengan keadaan di lingkungan internasional yang jika tidak dicari solusinya maka akan memberikan kerugian bagi negara-negara yang terlibat, misalnya masalah imigran gelap, peredaran narkoba, dan perdagangan manusia. Tipe yang kedua yaitu masalah yang membawa konsekuensi secara luas terhadap lingkungan internasional sehingga dianggap sebagai permasalahan yang menjadi tanggung jawab bersama. Isu-isu pada tipe kedua ini sering dibahas dalam forum kerja sama multilateral. (Coplin & Marbun, 2003)

Coplin menjelaskan, terdapat dua anggapan yang mendasari terjadinya kerja sama antarnegara. Yang pertama adalah anggapan bahwa suatu masalah tidak dapat diselesaikan jika tidak dilakukan kerja sama, dengan kata lain perlu ada kerja sama antarnegara untuk menyelesaikan suatu masalah. Anggapan yang kedua adalah bahwa penyatuan sumber daya akan mampu meniadakan kerugian berlebih, akibat dari usaha yang sia-sia, dan mampu meningkatkan efisiensi dari suatu pelaksanaan pekerjaan negara dalam bidang apapun. Terbatasnya sumber daya, seperti tenaga kerja dan pendidik yang terampil, modal, dan bahan mentah, dapat diatasi dengan melakukan kerja sama secara kolektif. Dalam bidang kerja sama

ekonomi, banyak kerja sama antarnegara yang berusaha memajukan pertumbuhan ekonomi di negaranya masing-masing dengan memperhatikan peningkatan perdagangan, pengaturan pasar, dan stabilitas kondisi finansial internasional. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibuat selain untuk meningkatkan perdagangan, juga untuk memperbaiki kondisi ekonomi secara umum dengan meningkatkan produktivitas dan kesempatan kerja. (Coplin & Marbun, 2003)

D. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penulis munculkan hipotesa dari rumusan masalah “mengapa Turki meningkatkan kerja sama ekonomi dengan Jepang dalam *Japan-Turkey Economic Partnership Agreement (EPA)* ? “ adalah :

1. Karena Turki berusaha meningkatkan perdagangan internasional dan investasi asing dengan Jepang.
2. Karena Turki mendapat pengaruh dari Kementrian Ekonomi Turki untuk meningkatkan kerja sama dalam *Economic Partnership Agreement*.

E. Metode Penelitian

Penulis melengkapi data dengan menggunakan metode studi pustaka yaitu dengan menghimpun data sekunder yang memuat informasi-informasi yang berkaitan dengan topik penelitian (rumusan masalah), seperti buku-buku, media massa cetak maupun elektronik (*online*), dan sumber-sumber lain yang tepercaya.

F. Jangkauan Penelitian

Untuk memudahkan penelitian, penulis membatasi jangka waktu antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2013. Namun tidak menutup kemungkinan dalam

beberapa pembahasan penulis akan menyajikan data di luar jangka waktu penelitian tersebut, yang sekiranya perlu untuk dibahas.

G. Tujuan Penelitian

- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor atau penyebab yang mendorong pemerintah Turki dalam memulai kerja sama ekonomi bilateral dengan Jepang, dengan menggunakan Teori pembuatan kebijakan luar negeri milik William D. Coplin.
- Penelitian ini juga bertujuan untuk menambah bahan bacaan yang berkaitan dengan politik luar negeri Turki dan secara spesifik membahas tentang hubungan Turki dan Jepang dalam *Japan-Turkey Economic Partnership Agreement*

H. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori yang digunakan, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian dan tujuan penelitian.

Bab II : Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang perkembangan ekonomi dan politik Turki sejak pemerintahan AKP, yang akan membahas mengenai profil partai AKP, Inovasi kebijakan-kebijakan dalam hal ekonomi dan politik luar negeri Turki.

Bab III : Pada bab ini akan membahas sejarah dan dinamika perkembangan hubungan bilateral Jepang dan Turki. Bab ini akan dikaji dalam beberapa sub-bab yaitu pada awal abad ke 20, pada masa perang

Dunia II, pada masa setelah Perang Dunia II, serta pada masa setelah tahun 2000.

Bab VI : Pada bab ini penulis akan menjelaskan sistem pengambilan keputusan di Pemerintahan Turki, selanjutnya akan membahas faktor-faktor yang mendorong pemerintah Turki dalam memulai perjanjian kerja sama ekonomi dengan Jepang.

Bab V : Pada bab ini berisi kesimpulan dan ringkasan singkat dari uraian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.